



KAJIAN HUKUM

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA TERHADAP PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG

Penyusun:

- Dewi Handayani Subekti, S.H., M.H.
- Mohammad Faiz Marasabessy, S.H., M.M.



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	2
C. Tujuan.....	3
D. Ruang Lingkup Kajian	3
E. Metode Penelitian.....	3
BAB II KAJIAN TEORITIS	5
BAB III PEMBAHASAN	8
A. Data Kabupaten/Kota Yang Terdampak	8
1. Provinsi Jawa Barat	8
2. Kabupaten Bandung	11
3. Kota Bandung	13
4. Kabupaten Bandung Barat	15
5. Kota Banjar	16
6. Kabupaten Bekasi.....	18
7. Kota Bekasi.....	19
8. Kabupaten Bogor	20
9. Kota Bogor	21
10. Kabupaten Ciamis	22
11. Kabupaten Cianjur	24
12. Kota Cimahi	25
13. Kabupaten Cirebon.....	28
14. Kota Cirebon.....	28
15. Kota Depok	28
16. Kabupaten Garut	30
17. Kabupaten Indramayu	32
18. Kabupaten Karawang	34
19. Kabupaten Kuningan	36
20. Kabupaten Majalengka	36
21. Kabupaten Pangandaran.....	39
22. Kabupaten Purwakarta	39

23. Kabupaten Subang	40
24. Kabupaten Sukabumi	41
25. Kota Sukabumi	42
26. Kabupaten Sumedang	42
27. Kabupaten Tasikmalaya	43
28. Kota Tasikmalaya	43
B. Peraturan Daerah di Kabupaten Karawang yang terdampak dan Alternatif Penyelesaiannya.....	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdampak pada Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya terhadap Peraturan Daerah yang memiliki sanksi pidana maupun denda, hal ini dikarenakan terdapat perubahan dalam pidana pokok yaitu:

- a. pidana penjara;
- b. pidana tutupan;
- c. pidana pengawasan;
- d. pidana denda; dan
- e. pidana kerja sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 jenis pidana denda dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini dimaksudkan agar dalam perumusan Tindak Pidana tidak perlu disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan menunjuk kategori denda yang sudah ditentukan dalam Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dasar pemikiran penggunaan sistem kategori tersebut adalah bahwa pidana denda merupakan jenis pidana yang relatif sering berubah nilainya karena perkembangan nilai mata uang akibat situasi perekonomian. Dengan demikian, jika terjadi perubahan nilai mata uang, sistem kategori akan lebih mudah dilakukan perubahan atau penyesuaian.

Pemberian sanksi pidana dalam Peraturan Daerah pada Pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori III

- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

B. Permasalahan

Berdasarkan ketentuan Bab II Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menyatakan bahwa :

- (1) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana kurungan diubah dengan ketentuan:
 - a. Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. Pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan :

- a. Pidana denda kurang dari kategori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan
 - b. Pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
- a. Pidana kurungan dihapuskan; dan
 - b. Pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Atas pertimbangan tersebut maka permasalahan yang perlu dikaji adalah:

1. Peraturan Daerah mana saja yang terdampak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana?
2. Langkah yang perlu segera dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana?

C. Tujuan

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tujuan yang diharapkan dengan adanya kajian ini adalah dapat memberikan sumbang saran dan upaya penyelesaian permasalahan bagi Daerah yang memiliki Peraturan Daerah terdampak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

D. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian meliputi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan cara menelaah norma, asas dan peraturan perundang-undangan melalui bahan pustaka serta data sekunder untuk mengetahui implikasi dari terbitnya Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana terhadap Peraturan Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Peraturan Daerah adalah peraturan yang memuat norma-norma yang mengatur sesuatu yang berlaku di suatu lingkungan tertentu dan ditetapkan oleh yang berkuasa dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan pengertian dasar dari hukum adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*recht ground*) bagi pembuatan suatu peraturan.¹

Pengertian Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam pasal 1 angka 25 adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah atau yang disebut dengan nama lain adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum dari suatu perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Kebijakan sanksi pidana adalah sebagai kebijakan publik pada umumnya dengan prinsip dasar harus merupakan kebijakan yang rasional. Demikian halnya dengan penerapan kebijakan sanksi pidana. Ruang lingkup kebijakan kriminal dengan menggunakan sanksi hukum pidana, dikemukakan Herbert L. Packer sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana diperlukan, kita tak dapat hidup, kini maupun masa yang akan datang tanpa sanksi pidana (*Dekriminal sanction is indispensable we could not, nor in the foreseeable future get long with out it*);
- b. Sanksi pidana dapat digunakan sebagai sarana yang baik yang kita miliki untuk menghadapi dengan segera bahaya besar yang mengancam (*The Criminal sanction*

¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.166.

is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm);

- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan pengancam yang utama. Sanksi pidana merupakan penjamin jika digunakan secara cermat dan manusiawi, Sanksi pidana merupakan pengancam jika digunakan secara paksa dan diskriminasi.²

Sebagai ukuran rasionalitas kebijakan itu dapat diletakkan pada masalah keberhasilan sanksi pidana itu dalam mencapai tujuannya. Sedangkan tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat. Kebijakan sanksi pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari seluruh kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari rencana Pembangunan nasional.³

Sehubungan dengan kebijakan sanksi pidana yang merupakan Upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan pada umumnya dan pelanggaran pada Peraturan Daerah pada khususnya akan mempunyai arti dalam pembangunan di daerah apabila dapat memberi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan kebijakan sanksi pidana dalam peraturan daerah dapat dilaksanakan secara maksimal apabila:

Pertama jika kebijakan sanksi yang dimuat dalam Peraturan Daerah dirumuskan sesuai dengan patokan teori yang berlaku serta mengacu pada KUHP.

Ditegaskan juga oleh Bassioni bahwa sanksi pidana harus disepadankan dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Hal yang dimaksud seperti pemeliharaan tertib masyarakat, perlindungan warga masyarakat dari kejahatan atau pelanggaran, kerugian dan memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan, sosial, martabat kemanusiaan keadilan individu dan lain sebagainya.⁴

Kedua adanya rasa tanggung jawab bagi setiap aparat penegak hukum sebagai aparat pelaksana dalam menerapkan sanksi pidana Peraturan Daerah, tanpa rasa takut dan ragu memberikan sanksi bagi pelanggarnya.

² Herbert, L.Packer,1968, *The Limits Of Criminal Sanction*, California, Stanford University Press, hlm.364-366.

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Pidana*, BP-UNDIP, Semarang,1995, hlm 9

⁴ Barda Nawawi Arief,1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Amanta, Semarang, hlm 43.

Ketiga dukungan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah.

Untuk memudahkan dalam penyusunan Raperda dalam rangka efektivitas dan efisiensi sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus. Metode Omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan :

- a. memuat materi muatan baru;
- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan Undang sama; dan/atau
- c. mencabut Peraturan perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama,

Dengan menggabungkan ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB III PEMBAHASAN

A. Data Kabupaten/Kota Yang Terdampak

Pada tanggal 29 Desember 2025 Biro Hukum Provinsi Jawa Barat melalui WhatsApp meminta kepada pengelola JDIH Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota untuk menginventarisir dan mengisi Peraturan Daerah yang memuat sanksi di masing-masing Kabupaten/kota berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1. Provinsi Jawa Barat

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	5 Tahun 2024	Penyelenggaraan Perhubungan	2024-05-17	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	11 Tahun 2021	Penyelenggaraan Kearsipan	2021-12-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	3 Tahun 2021	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	2021-02-10	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	2 Tahun 2021	Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat	2021-02-10	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
5	11 Tahun 2019	Kawasan Tanpa Rokok	2019-04-04	Rp50.000.000,00	7 tahun	Berlaku
6	2 Tahun 2017	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	2017-04-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	1 Tahun 2017	Pengelolaan Air Tanah	2017-04-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
8	1 Tahun 2016	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010	2016-04-07	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
		tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat				
9	16 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	2015-12-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
10	16 Tahun 2014	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjarian, Nilai Tradisional, dan Museum	2014-09-11	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	12 Tahun 2014	Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat	2014-07-25	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
12	8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Kehutanan	2014-07-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
13	6 Tahun 2014	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	2014-08-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
14	5 Tahun 2014	Jasa Konstruksi	2014-07-25	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
15	1 Tahun 2013	Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung	2013-01-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
16	22 Tahun 2012	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2022-12-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
17	12 Tahun 2012	Pencegahan dan Penanggulangan Human	2012-06-18	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
		Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune deficiency Syndrome (AIDS)				
18	11 Tahun 2012	Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat	2012-06-18	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
19	10 Tahun 2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2012-06-18	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	9 Tahun 2012	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2012-06-18	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
21	1 Tahun 2012	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan	2012-01-24	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
22	10 Tahun 2011	Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	2011-09-21	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
23	7 Tahun 2011	Pengelolaan Perikanan	2011-09-21	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
24	6 Tahun 2011	Pengurusan Hutan Mangrove Dan Hutan Pantai	2011-09-21	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
25	5 Tahun 2011	Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Dan Gabah	2011-09-21	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
26	27 Tahun 2010	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2010-12-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
27	15 tahun 2010	Pengendalian Produksi Dan Peredaran Garam	2011-02-09	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
28	13 Tahun 2010	Pembangunan Dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jawa Barat Dan Kertajati Aerocity	2010-08-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
29	12 Tahun 2010	Pengelolaan Sampah Di Jawa Barat	2010-10-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
30	10 Tahun 2010	Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	2010-08-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
31	3 Tahun 2010	Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak	2010-01-12	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
32	8 Tahun 2008	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	2008-08-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
33	4 Tahun 2008	Irigasi I	2008-07-08	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
34	11 Tahun 2006	Pengendalian Pencemaran Udara	2006-12-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
35	6 Tahun 2006	Pengelolaan Panas Bumi	2006-08-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
36	8 Tahun 2005	Sempadan Sumber Air	2005-09-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
37	7 Tahun 2005	Pengendalian dan Rehabilitasi Lahan Kritis	2005-09-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
38	2 Tahun 2002	Perlindungan Lingkungan Geologi	2002-04-18	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

2. Kabupaten Bandung

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	3 Tahun 2004	Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol	2004-06-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	9 Tahun 2005	Zakat, Infaq dan Shodaqoh	2005-09-29	Rp30.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	16 Tahun 2006	Pedoman Pemberian Nama-nama Jalan, Gang, Gedung Taman dan Tempat Rekreasi di Wilayah Kab. Bandung	2006-11-15	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
4	9 Tahun 2009	Izin Penyelenggaraan Reklame	2009-05-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
5	7 Tahun 2009	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	2009-04-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
6	16 Tahun 2009	Tata Bangunan	2009-08-20	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
7	22 Tahun 2009	Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Seluler Bersama	2009-08-20	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	26 Tahun 2009	Penyelenggaraan Sistem Pendidikan	2009-08-24	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	1 Tahun 2010	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2010-02-11	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
10	7 Tahun 2010	Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	2010-06-30	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
11	10 Tahun 2011	Irigasi	2011-06-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
12	14 Tahun 2021	Izin Usaha Jasa Konstruksi	2021-12-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
13	9 Tahun 2012	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2012-01-02	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	20 Tahun 2012	Rumah Susun	2012-05-07	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
15	21 Tahun 2012	Rencana Tapak	2012-05-07	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
16	3 Tahun 2013	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	2013-01-02	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
17	14 Tahun 2013	Izin Lingkungan	2013-08-19	Rp3.000.000.000,00	3 tahun	Berlaku
18	15 Tahun 2013	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2013-08-19	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
19	8 Tahun 2014	Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang	2013-08-19	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	4 Tahun 2015	Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata	2014-05-25	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
21	5 Tahun 2015	Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	2015-05-25	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
22	13 Tahun 2015	Rumah Potong Hewan Dan Rumah Potong Unggas	2015-12-31	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
23	14 Tahun 2015	Pasar Hewan	2015-12-31	Rp25.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
24	15 Tahun 2015	Transportasi	2015-12-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
25	19 Tahun 2016	Penanggulangan Penyakit	2016-12-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
26	13 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok	2017-12-08	Rp500.000,00	7 hari	Berlaku
27	8 Tahun 2019	Pemakaman	2019-08-05	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
28	5 Tahun 2020	Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	2020-10-23	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
29	1 Tahun 2022	Pengelolaan Sampah	2022-03-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

3. Kota Bandung

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	5 Tahun 2025	Penyelenggaraan Reklame	2025-06-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
2	6 Tahun 2025	Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya	2025-06-24		5 tahun	Berlaku
3	1 Tahun 2024	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2024-01-04	Rp10.000.000,00		Berlaku
4	10 Tahun 2024	Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol	2024-12-06	Rp10.000.000,00		Berlaku
5	4 Tahun 2023	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2023-03-01	Paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar	3 Bulan	Berlaku
6	1 Tahun 2022	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Corona Virus Disease 2019	2022-07-08	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	3 Tahun 2022	Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana	2022-09-20	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	4 Tahun 2021	Kawasan Tanpa Rokok	2021-05-17	Rp500.000,00		Berlaku
9	1 Tahun 2020	Sistem Kesehatan Kota Bandung	2020-01-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
10	9 Tahun 2019	Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	2019-08-16	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	4 Tahun 2018	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	2018-03-23	Rp50.000.000	6 Bulan	Berlaku
12	9 Tahun 2018	Pengelolaan Sampah	2018-10-16	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
13	14 Tahun 2018	Bangunan Gedung	2018-12-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	5 Tahun 2017	Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2017-03-14	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
15	2 Tahun 2015	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2015-03-03		3 Bulan	Berlaku
16	3 Tahun 2015	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa	2015-03-03		3 Bulan	Berlaku
17	4 Tahun 2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2015-09-01	Rp50.000,00		Berlaku
18	12 Tahun 2015	Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome	2015-12-31	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

4. Kabupaten Bandung Barat

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	3 Tahun 2024	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	2024-09-02	Rp10.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp50.000.000,00	6 Bulan	
2	1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2023-09-21	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
3	4 Tahun 2022	Penanggulangan Penyakit Menular	2022-06-17	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	2 Tahun 2020	Pengelolaan Sampah	2020-05-13	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
5	5 Tahun 2020	Penyelenggaraan Keolahragaan	2020-09-09	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
6	2 Tahun 2017	Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS	2017-06-16	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	4 tahun 2016	Kawasan Tanpa Rokok	2016-06-10	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	3 Tahun 2014	Pengendalian Dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol	2014-08-19	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
				Rp25.000.000,00	3 Bulan	
9	1 Tahun 2013	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Logo Daerah, Bendera Daerah, Dan Bendera Jabatan Bupati	2013-03-15	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
10	9 Tahun 2012	Penyelenggaraan Reklame	2012-10-01	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
11	14 Tahun 2012	Izin Lokasi	2012-11-06	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
12	19 Tahun 2012	Pengelolaan Air Permukaan	2014-12-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
13	18 Tahun 2011	Penyelenggaraan Perizinan Perdagangan	2011-08-12	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	2 tahun 2010	Pengelolaan Perikanan	2010-01-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
15	7 tahun 2010	Perizinan Kesehatan	2010-12-03	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

5. Kota Banjar

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	3 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kesehatan Daerah	2023-02-10	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
2	17 Tahun 2023	Lambang Daerah Kota Banjar	2024-01-05	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	23 Tahun 2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2023-12-29	Rp100.000,00		Berlaku
4	4 Tahun 2022	Kawasan Kumuh Kota Banjar	2022-07-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
5	3 Tahun 2021	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2021-06-24	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	2 Tahun 2020	Retribusi Pelayanan Pasar	2020-07-23	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
7	1 Tahun 2019	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2019-02-27	Paling sedikit Rp100.000,00 Paling Banyak Rp500.000,00	3 Bulan	Berlaku
8	1 Tahun 2017	Izin Peruntukan Pengguna Tanah	2017-03-24	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	2 Tahun 2016	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Banjar	2016-02-09	Rp50.000.000,00	5 Bulan	Berlaku
10	8 Tahun 2014	Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah dan Bangunan	2014-09-17	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	9 Tahun 2014	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 s/d 2033	2014-12-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
12	3 Tahun 2013	Kelas Jalan	2013-03-04	Rp5.000.000	3 Bulan	Berlaku
13	5 Tahun 2013	Pengendalian Menara Telkom	2013-04-08	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
14	14 Tahun 2013	Pemanfaatan Jalan	2013-11-12	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
15	15 Tahun 2013	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan	2013-11-12	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
		Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga				
16	16 Tahun 2013	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	2013-11-12	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
17	4 Tahun 2009	Larangan Peredaran Minuman Beralkohol	2009-07-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
18	5 Tahun 2009	Larangan Pelacuran	2009-07-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
19	21 Tahun 2004	Garis Sempadan	24 Juni 2004-06-24	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

6. Kabupaten Bekasi

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	2 Tahun 2025	Pengelolaan Sampah	2025-05-21	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
2	3 Tahun 2025	Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	2025-08-25	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
3	3 Tahun 2022	Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019	2022-10-14	Rp10.000.000,00	30 Hari	Berlaku
4	2 Tahun 2018	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018-2025	2018-07-24	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
5	1 Tahun 2018	Kawasan Tanpa Rokok	2018-03-27	Rp10.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	9 Tahun 2017	Penyelenggaraan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah susun, dan Perniagaan di kabupaten Bekasi	2017-12-27	Rp5.000.000.000,00		Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
7	3 Tahun 2016	Penyelenggaraan Kepariwisata	2016-01-15	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	5 Tahun 2013	Cagar Budaya	2013-05-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
9	4 Tahun 2013	Irigasi	2013-05-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
10	2 Tahun 2013	Pengelolaan Usaha Pertambangan	2013-02-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	4 Tahun 2012	Ketertiban Umum	2012-08-27	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

7. Kota Bekasi

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	6 Tahun 2025	Bangunan Gedung	2025-04-10	Rp50.000.000,00		Berlaku
2	17 Tahun 2024	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol	2024-12-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	18 Tahun 2024	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	2024-12-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	1 Tahun 2023	Pembentukan Dana Cadangan untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024	2023-01-09	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	2 Tahun 2023	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2023-07-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	8 Tahun 2022	Sistem Kesehatan Daerah	2022-09-21	Rp50.000.000,00		Berlaku
7	9 Tahun 2019	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2019-07-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
8	1 Tahun 2018	Pengawasan Kualitas Air Minum dan Tempat Pengelolaan Makanan Siap Saji	2018-02-09	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	4 Tahun 2018	Penanggulangan Kemiskinan	2018-02-09	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
10	2 Tahun 2014	Pengendalian Pencemaran Udara	2014-02-13	Rp50.000.000,00		Berlaku
11	5 Tahun 2013	Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta	2013-03-01	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
12	15 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi	2011-12-06	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
13	3 Tahun 2009	Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS Kota Bekasi	2009-07-03	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	11 Tahun 2005	Pencegahan Perjudian di Kota Bekasi	2005-11-22	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
15	3 Tahun 2004	Larangan Perbuatan Tuna Susila	2004-05-10	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

8. Kabupaten Bogor

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	1 Tahun 2022	Penanggulangan Penyakit Menular	2022-10-28	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	1 Tahun 2017	Izin Gangguan	2017-03-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	8 Tahun 2016	Kawasan Tanpa Rokok	2016-08-04	Rp1.000.000,00 - Rp50.000.000,00	3 Hari - 3 Bulan	Berlaku
4	7 Tahun 2016	Kesejahteraan Sosial	2016-06-30	Rp10.000.000,00 - Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	9 Tahun 2015	Pencegahan Dan Penanggulangan Human	2015-10-28	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
		Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome				
6	4 Tahun 2015	Ketertiban Umum	2015-03-02	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	2 Tahun 2014	Pengelolaan Sampah	2014-03-17	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	5 Tahun 2013	Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online	2013-04-08	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	4 Tahun 2013	Irigasi	2013-04-08	Rp50.000.000,00	b Bulan	Berlaku
10	3 Tahun 2013	Kepariwisata	2013-04-08	Rp50.000.000,00	b Bulan	Berlaku
11	7 Tahun 2012	Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	2012-07-30	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
12	4 Tahun 2011	Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi	2011-03-10	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
13	17 Tahun 2011	Pengelolaan Air Tanah	2011-10-11	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

9. Kota Bogor

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	12 Tahun 2009	Kawasan Tanpa Rokok	2009-12-21	Rp50.000,00 - Rp 5.000.000,00	3 Hari - 3 Minggu	Berlaku
2	10 Tahun 2018	Kawasan Tanpa Rokok	2018-12-06	Rp50.000,00 - Rp 5.000.000,00	3 Hari - 3 Minggu	Berlaku
3	1 Tahun 2021	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	2021-02-15	Rp50.000,00 - Rp 10.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

10. Kabupaten Ciamis

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	3 Tahun 2024	Ketenagakerjaan	2024-04-19	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
2	7 Tahun 2023	Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome	2023-04-12	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	8 Tahun 2023	Koperasi	2023-04-12	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	9 Tahun 2023	Protokol Kesehatan Dalam Penanggulangan Wabah Penyakit	2023-04-12	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	11 Tahun 2023	Penyelenggaraan Perhubungan	2023-06-12	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	1 Tahun 2022	Sistem Kesehatan Daerah	2022-01-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
7	4 Tahun 2022	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Galuh	2022-02-11	Rp1.000.000,00	1 Bulan (minimal)	Berlaku
8	12 Tahun 2022	Pengelolaan Pasar Ternak	2022-09-09	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	2 Tahun 2018	Pengelolaan Sampah	2018-10-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
10	10 Tahun 2018	Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman	2018-12-31	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
11	14 Tahun 2017	Penyelenggaraan Jalan	2017-12-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
12	7 Tahun 2015	Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2015-03-31	Rp25.000.000,00	3 Bulan (minimal)	Berlaku
13	2 Tahun 2014	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	2014-01-07	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	3 Tahun 2014	Garis Sempadan	2014-01-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
15	4 Tahun 2014	Irigasi	2014-01-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
16	7 Tahun 2014	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2014-01-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
17	10 Tahun 2014	Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara	2014-01-07	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
18	11 Tahun 2014	Pengelolaan Air Tanah	2014-01-07	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
19	6 Tahun 2013	Pembangunan dan Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu di Kabupaten Ciamis	2023-01-09	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	16 Tahun 2013	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	2013-09-13	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
21	19 Tahun 2013	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	2013-09-13	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
22	10 Tahun 2012	Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	2012-06-04	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
23	20 Tahun 2011	Penyelenggaraan Kesehatan	2011-10-10	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
24	21 Tahun 2011	Penyelenggaraan Reklame	2011-10-10	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
25	22 Tahun 2011	Pengelolaan Hutan Hak	2011-10-10	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
26	6 Tahun 2007	Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta di Wilayah Kabupaten Ciamis	2007-08-02	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
27	12 Tahun 2002	Pemberantasan Pelacuran	2002-03-04	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
28	4 Tahun 2001	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	2001-06-08	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

11. Kabupaten Cianjur

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	13 Tahun 2025	Pengendalian dan Penanganan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Cianjur	2013-12-05	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	17 Tahun 2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2024-01-02	Rp100.000,00 - Rp500.000,00		Berlaku
3	5 Tahun 2023	Retribusi Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Atas Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	2022-02-02	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
4	6 Tahun 2021	Pengelolaan Sampah	2021-06-15	Rp250.000,00- Rp50.000.000,00	-	Berlaku
5	2 Tahun 2018	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	2018-04-10	2 (dua) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
6	13 Tahun 2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2015-12-30	Rp50.000,00- Rp2.000.000,00	-	Berlaku
7	3 Tahun 2015	Kawasan Tanpa Asap Rokok	2015-06-19	Rp1.000.000,00	-	Berlaku
8	3 Tahun 2013	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2013-05-13	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
9	12 Tahun 2013	Larangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	2013-12-05	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
10	1 Tahun 2012	Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur ke Luar Negeri	2012-01-13	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	7 Tahun 2012	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaman dan Persemayaman Mayat	2012-06-01	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
12	12 Tahun 2012	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2012-06-01	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
13	15 Tahun 2012	Retribusi Izin Gangguan	2012-06-01	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
14	5 Tahun 2010	Penyelenggaraan Usaha Perikanan	2010-05-03	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
15	4 Tahun 2006	Kajian Lingkungan	2006-07-20	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
16	17 Tahun 2005	Retribusi Usaha Perikanan	2025-06-01	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
17	12 Tahun 2005	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	2005-06-01	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
18	12 Tahun 2004	Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	2005-01-03	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
19	14 Tahun 2002	Bangunan	2002-11-29	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	21 Tahun 2000	Larangan Pelacuran	2000-11-11	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
21	6 Tahun 1997	Garis Sempadan	1997-10-08	Rp50.000,00	3 Bulan	Berlaku
22	18 Tahun 1995	Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan	1995-06-16	Rp50.000,00	3 Bulan	Berlaku
23	20 Tahun 1987	Tata cara Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur	1987-12-08	Rp50.000,00	3 Bulan	Berlaku

12. Kota Cimahi

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	1 Tahun 2002	Lambang Kota Cimahi	2002-11-22	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
2	18 Tahun 2003	Kewajiban Pembuatan Sumur Resapan Bagi Perusahaan, Perumahan,	2003-03-12	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
		Rumah Sakit dan Perkantoran				
3	13 Tahun 2006	Nama Jalan dan Sarana Umum di Kota Cimahi	2006-10-09	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	1 Tahun 2010	Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	2010-05-19	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	7 Tahun 2010	Ketentuan dan Tata cara Pelayanan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri	2010-02-24	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	11 Tahun 2011	Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	2011-03-11	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	13 Tahun 2011	Izin Usaha di Bidang Perdagangan	2011-05-09	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
8	7 Tahun 2012	Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Wilayah Kota Cimahi	2012-07-09	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
9	16 Tahun 2012	Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang	2012-10-16	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
10	18 Tahun 2012	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	2012-12-28	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	14 Tahun 2013	Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	2013-11-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
12	10 Tahun 2014	Penyelenggaraan Pendidikan	2014-09-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
13	18 Tahun 2014	Izin Penyelenggaraan Reklame	2014-09-15	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	8 Tahun 2015	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kota Cimahi	2015-08-22	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
15	12 Tahun 2015	Pengelolaan Air Limbah Domestik	2015-10-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
16	8 Tahun 2016	Penataan dan Perundangan Pasar Tradisional, Pasar Perbelanjaan dan Toko Modern	2016-10-31	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
17	5 Tahun 2017	Ketertiban Umum	2017-08-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
18	7 Tahun 2017	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	2017-08-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
19	9 Tahun 2017	Kawasan Tanpa Rokok	2017-08-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	10 Tahun 2017	Penyediaan, Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan Permukiman dari Pengembang Kepada Pemerintah Kota	2017-08-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
21	5 tahun 2018	Penyelenggaraan Perpustakaan	2018-07-16	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
22	12 Tahun 2018	Penyelenggaraan Rumah Kos	2018-08-18	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
23	16 Tahun 2018	Izin Penyelenggaraan Reklame	2018-10-19	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
24	19 Tahun 2018	Penyelenggaraan Perparkiran	2018-12-04	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
25	5 Tahun 2019	Penyelenggaraan Kemetrolgian	2019-04-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
26	6 Tahun 2019	Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah	2019-04-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
27	9 Tahun 2021	Ketertiban Umum	2021-09-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

13. Kabupaten Cirebon

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	4 Tahun 2018	Prosedur Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari Pengembang kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon	2018-03-29	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	6 Tahun 2020	Penyelenggaraan Pemakaman	2020-07-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	4 Tahun 2021	Ketertiban Umum	2021-07-29	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

14. Kota Cirebon

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	2 Tahun 2021	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	2021-03-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	1 Tahun 2022	Penyelenggaraan Utilitas Kabel	2022-04-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

15. Kota Depok

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	7 Tahun 2025	Pengelolaan Sampah	2025-08-04	Rp50.000.000,00		Berlaku
2	1 Tahun 2024	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2024-01-02	4 (empat) kali jumlah pajak terutang	2 Tahun	Berlaku
3	2 Tahun 2024	Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	2024-01-04	Rp50.000.000,00		Berlaku
4	2 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2023-07-03	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
5	8 Tahun 2023	Jaringan Utilitas Terpadu	2023-10-30	Rp50.000.000,00		Berlaku
6	3 Tahun 2022	Protokol Kesehatan Dalam Pengendalian Pandemi	2022-06-06	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	5 Tahun 2022	Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat	2022-07-08	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	11 Tahun 2022	Perlindungan Pohon	2022-10-28	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	2 Tahun 2021	Pengelolaan Pasar Rakyat	2021-01-25	100% (seratus persen) dari nilai sewa tempat berjualan	-	Berlaku
10	13 Tahun 2021	Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	2021-11-01	Rp50.000.000,00	-	Berlaku
11	1 Tahun 2020	Penyelenggaraan Bidang Perhubungan	2020-01-21	Rp2.000.000,00	-	Berlaku
12	2 Tahun 2020	Kawasan Tanpa Rokok	2020-01-22	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
13	8 Tahun 2018	Pengelolaan Air Limbah Domestik	2018-10-01	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	1 Tahun 2017	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2017-01-16	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
15	6 Tahun 2017	Menara Telekomunikasi	2017-01-16	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
16	3 Tahun 2014	Kawasan Tanpa Rokok	2014-05-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

16. Kabupaten Garut

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	9 Tahun 2025	Pencegahan Kebakaran, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	2025-12-10	Rp10.000.000,00		Berlaku
2	8 Tahun 2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2023-12-18	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
3	10 Tahun 2022	Penyelenggaraan Perhubungan	2022-11-14	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
4	8 Tahun 2020	Irigasi	2020-12-30	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	1 Tahun 2018	Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau bagi Kesehatan	2018-05-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	18 Tahun 2017	Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	2017-12-29	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	12 Tahun 2015	Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	2015-12-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	13 Tahun 2015	Anti Perbuatan Maksiat	2015-12-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	2 Tahun 2014	Pembentukan Peraturan Daerah	2014-05-13	Rp500.000.000,00	2 Tahun	Berlaku
10	4 Tahun 2014	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	2014-07-02	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	5 Tahun 2013	Pengelolaan Air Tanah	2013-06-17	Rp1.500.000.000,00	9 Tahun	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
12	6 Tahun 2013	Penyelenggaraan Kearsipan	2013-06-17	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
13	23 Tahun 2011	Penyelenggaraan Perhubungan	2011-08-11	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	2 Tahun 2008	Anti Perbuatan Maksiat	2008-01-14	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
15	12 Tahun 2008	Irigasi	2008-08-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
16	6 Tahun 2004	Rencana Pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) di Kabupaten Garut	2004-06-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
17	4 Tahun 2002	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
18	7 Tahun 2002	Rencana Umum Tata Ruang Kota Garut	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
19	8 tahun 2002	Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Malangbong	2002-08-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	9 Tahun 2002	Rencana Umum Tata Ruang Kota Kecamatan Banyuresmi	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
21	12 Tahun 2002	Pemakaian Pasar Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak di dalam dan di Luar Pasar Hewan	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
22	13 Tahun 2002	Rencana Pemakaian Kekayaan Daerah	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
23	14 tahun 2002	Pengelolaan Air Bawah Tanah	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
24	15 Tahun 2002	Pengelolaan Pertambangan	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
25	16 tahun 2002	Kendaraan Tidak Bermotor	2002-08-23	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
26	3 Tahun 2001	Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Pameungpeuk	2001-04-30	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
27	7 Tahun 1994	Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut	1994-05-02	Rp50.000,00	3 Bulan	Berlaku
28	9 tahun 1994	Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Garut	1994-05-02	Rp50.000,00	3 Bulan	Berlaku
29	3 Tahun 1993	Pemungutan Uang Cetak Tulis (Leges)	1993-05-15	Rp50.000,00	3 Bulan	Berlaku

17. Kabupaten Indramayu

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	4 Tahun 2025	Pengelolaan Sampah	2025-09-18	Rp1.000.000,00	-	Berlaku
2	1 Tahun 2024	Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2024-01-04	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
3	8 Tahun 2016	Kawasan Tanpa Rokok	2016-09-29	Rp10.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	1 Tahun 2022	Penyelenggaraan Keolahragaan	2022-02-04	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	3 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Drainase	2022-05-09	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
6	6 Tahun 2022	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	2022-08-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	18 Tahun 2012	Perlindungan Perempuan	2012-12-26	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
8	3 Tahun 2020	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	2020-12-30	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
9	8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2014-08-22	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
10	22 Tahun 2007	Irigasi	2008-01-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	2 Tahun 2017	Penyelenggaraan Rumah Kos	2017-08-11	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
12	12 Tahun 2017	Pengelolaan Tanah Rawa Dan Tanah Eks Pengangonan	2017-12-22	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
13	2 Tahun 2016	Pengelolaan Zakat	2016-04-26	Rp50.000.000,00	1 tahun	Berlaku
14	3 Tahun 2016	Penanggulangan Bencana Daerah	2016-04-26	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
15	8 Tahun 2015	Pendidikan Di Kabupaten Indramayu	2015-11-24	Rp.50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
16	9 Tahun 2015	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	2015-11-24	denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6 tahun	Berlaku
17	6 Tahun 2014	Pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil Dan Penataan Fungsi Pulau Biawak, Gosong Dan Pulau Candikian	2014-08-22	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
18	8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	2014-08-22	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

18. Kabupaten Karawang

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	3 Tahun 2025	Penyelenggaraan Pemakaman	2025-05-28	Rp50.000.000,00		Berlaku
2	2 Tahun 2024	Pemajuan Kebudayaan Daerah	2024-01-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	6 Tahun 2024	Penataan Penyelenggaraan Pergudangan	2024-08-29	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	3 Tahun 2023	Penamaan Jalan, Fasilitas Umum dan Penomoran Bangunan Gedung	2023-06-12	Rp10.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp20.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp30.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	13 Tahun 2023	Desa	2023-12-21	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	17 Tahun 2023	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2023-12-27	3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang	3 Bulan	Berlaku
7	3 Tahun 2022	Penataan Garis Sempadan	2022-04-26	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	10 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Drainase	2022-10-31	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	10 Tahun 2021	Pengendalian, Pengawasan, dan Pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol	2020-11-10	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
10	2 Tahun 2020	Penyelenggaraan Perhubungan	2020-03-23	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	8 Tahun 2020	Desa Wisata	2020-12-30	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
12	10 Tahun 2020	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat	2020-12-30	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
13	2 Tahun 2019	Penerangan Jalan Umum	2019-01-14	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
14	3 Tahun 2019	Izin Penyelenggaraan Reklame	2019-03-08	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
15	12 Tahun 2019	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2019-07-02	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
16	17 Tahun 2019	Penanggulangan dan Pengendalian Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrom	2019-12-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
17	1 Tahun 2018	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	2018-03-09	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
18	3 Tahun 2018	Penyelenggaraan Perparkiran	2018-05-03	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
19	9 Tahun 2017	Pengelolaan Sampah	2017-10-25	Rp50.000.000,00	5 bulan	Berlaku
				Rp30.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	11 Tahun 2017	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2017-12-04	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
21	5 Tahun 2016	Kawasan Tanpa Rokok	2016-06-15	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
22	11 Tahun 2016	Irigasi	2016-10-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
23	2 Tahun 2015	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang	2015-05-04	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
24	4 Tahun 2015	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	2015-08-14	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
25	12 Tahun 2015	Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan Di Kabupaten Karawang	2015-12-31	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
26	2 Tahun 2014	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	2014-01-23	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
27	4 Tahun 2013	Cagar Budaya Kabupaten Karawang	2013-04-11	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
28	8 Tahun 2012	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2012-09-25	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
29	1 Tahun 2011	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	2011-01-20	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
30	6 Tahun 2004	Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beriodium	2004-07-16	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
31	10 Tahun 2002	Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh	2002-10-29	Rp30.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
32	8 Tahun 1994	Lambang Daerah	1994-08-13	Rp50.000,00	3 bulan	Berlaku

19. Kabupaten Kuningan

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	2 Tahun 2024	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	2024-03-14	Rp50.000.000,00	2 Bulan	Berlaku
2	1 Tahun 2021	Kawasan Tanpa Rokok	2021-01-07	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	1 Tahun 2020	Retribusi Perizinan Tertentu	2020-03-04	3 (tiga) kali dari jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar	3 Bulan	Berlaku

20. Kabupaten Majalengka

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	5 Tahun 2023	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2023-10-18	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
2	3 Tahun 2023	Pengelolaan Sampah	2023-08-11	Rp50.000.000,00	6 bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
3	2 Tahun 2023	Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2023-06-05	Paling banyak Rp50.000.000,00	Laing lama 3 (3) bulan	Berlaku
4	10 Tahun 2022	Perlindungan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan	2022-12-30	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	9 Tahun 2022	Ketenagakerjaan	2022-12-30	Rp5.000.000,00 - Rp.50.000.000,00		Berlaku
6	3 Tahun 2022	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2022-08-01	Pidana denda paling banyak 3 kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar	3 bulan	Berlaku
7	11 Tahun 2019	Penanggulangan Kemiskinan	2019-11-08	Rp50.000.000,00	6 bulan	Berlaku
8	10 Tahun 2019	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat	2019-11-08	Rp50.000.000,00	6 bulan	Berlaku
9	6 Tahun 2018	Bangunan Gedung	2018-12-29	Paling banyak Rp50.000.000,00	6 bulan	Berlaku
10	12 Tahun 2016	Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing di Kabupaten Majalengka	2016-12-31	Paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar	3 bulan	Berlaku
11	6 Tahun 2015	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas di Lingkungan kabupaten Majalengka	2015-11-05	Paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar	3 bulan	Berlaku
12	1 Tahun 2013	Pengelolaan Sumber Daya Air	2013-07-18	Rp50.000.000,00	3 bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
13	4 Tahun 2012	Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka	2012-07-12	Rp50.000.000,00	3 bulan	Berlaku
14	2 Tahun 2012	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Majalengka	2012-03-29	Rp10.000.000,00	2 tahun	Berlaku
15	12 Tahun 2011	Tata Kearsipan di Kabupaten Majalengka	2011-12-01	Rp50.000.000,00	3 bulan	Berlaku
16	6 Tahun 2011	Larangan, Pengawasan, Penertiban Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	2011-08-26	Rp5.000.000,00	3 bulan	Berlaku
17	5 Tahun 2011	Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Majalengka	2011-08-22	Rp50.000.000,00	3 bulan	Berlaku
18	7 Tahun 2009	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Kabupaten Majalengka	2009-10-05	Rp50.000.000,00	3 bulan	Berlaku
19	15 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Majalengka	2008-12-17	Paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang	6 bulan	Berlaku
20	14 Tahun 2007	Pelarangan Prostitusi di Kabupaten Majalengka	2007-10-29	Rp50.000.000,00	3 bulan	Berlaku
21	11 Tahun 2007	Peraturan Desa	2007-06-18	Rp5.000.000,00	3 bulan	Berlaku
22	10 Tahun 2007	Pengelolaan Parkir	2007-07-23	Rp50.000.000,00	3 bulan	Berlaku

21. Kabupaten Pangandaran

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	12 Tahun 2024	Pengelolaan Kawasan Resapan Air dan Kawasan Sekitar Mata Air	2024-12-04		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Berlaku

22. Kabupaten Purwakarta

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	9 Tahun 2024	Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran asal Kabupaten Purwakarta	2024-11-19	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
2	2 Tahun 2023	Tata kelola Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Permukiman	2023-02-27	25% (dua puluh lima persen) dari nilai kewajiban PSU	6 Bulan	Berlaku
3	9 Tahun 2023	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2023-08-10		6 Bulan	Berlaku
4	05 Tahun 2022	Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat	2022-09-19	Rp.50.000,00 – Rp5.000.000		Berlaku
5	9 Tahun 2021	Penyelenggaraan Pendidikan	2021-11-26	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	13 Tahun 2020	Penanggulangan Human Immuno Deficiency Virus/ Acquire Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) dan Tuberkulosis (TB)	30 12 2020	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	9 Tahun 2019	Kawasan Tanpa Rokok	27 09 2019	Rp5.000.000,00	7 hari	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
8	11 Tahun 2019	Penyelenggaraan Rumah Susun	27 09 2019	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
9	14 Tahun 2019	Pengelolaan Air Limbah Domestik	3 12 2019	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

23. Kabupaten Subang

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	3 Tahun 2023	Kawasan Tanpa Rokok	2023-07-24	Rp50.000.000,00		Berlaku
2	7 Tahun 2023	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat	2023-10-27		3 Bulan	Berlaku
3	6 Tahun 2001	Pengendalian Pengambilan Air di Bawah Tanah dan Air Permukiman	2001-04-04	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
4	7 Tahun 2001	Pengesahan Pertambangan	2001-04-04	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
5	8 Tahun 2001	Retribusi Pelayanan Persampahan	2001-04-04	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
6	9 Tahun 2001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2001-04-04	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
7	12 Tahun 2001	Kawasan Lindung	2001-07-04	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
8	6 Tahun 2002	Izin Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta di Kabupaten Subang	2022-07-05	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	5 Tahun 2006	Retribusi Izin Pembangunan Limbah Cair	2006-03-01	4 (empat) kali jumlah retribusi terutang	6 Bulan	Berlaku
10	6 Tahun 2006	Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan	2006-03-01	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
11	7 Tahun 2006	Pengelolaan Pertambangan	2006-03-01	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
12	8 Tahun 2006	Pengelolaan Air Bawah Tanah	2006-03-01	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
13	9 Tahun 2006	Pengelolaan Usaha Minyak dan Gas Bumi	2006-03-01	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
14	10 Tahun 2006	Retribusi Izin Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Swasta	2006-03-01	Rp,5,000,000,00	6 Bulan	Berlaku
15	11 Tahun 2006	Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasar	2006-03-01	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
16	12 Tahun 2006	Retribusi Pelayan Kesehatan di Badan Unit Swadana Daerah	2006-03-01	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
17	13 Tahun 2006	Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan	2006-03-01	Rp5.000.000,00	-	Berlaku
18	14 Tahun 2006	Izin Usaha Peternakan	2006-03-01	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
19	3 Tahun 2019	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang	2019-04-16	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
20	11 Tahun 2019	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	2019-12-31	Rp5.000.000.000,00		Berlaku
21	3 Tahun 2020	Pengelolaan Air Limbah Domestik	2023-10-23	Rp5.000.000,00	6 Bulan	Berlaku

24. Kabupaten Sukabumi

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	2 Tahun 2023	Pengelolaan Perikanan	2023-01-06	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
2	1 Tahun 2021	Pemberdayaan Koperasi	2021-03-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
3	2 Tahun 2019	Peternakan dan Kesehatan Hewan	2019-02-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
4	3 Tahun 2019	Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika dan Persandian	2019-02-04	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	4 Tahun 2019	Kawasan Tanpa Roko	2019-02-28	Rp1.000.000,00	1 Minggu	Berlaku
6	5 Tahun 2019	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2019-08-08	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
7	6 Tahun 2019	Pengelolaan Pasar Rakyat	2019-08-08	Rp30.000.000,00	2 Bulan	Berlaku

25. Kota Sukabumi

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1						

26. Kabupaten Sumedang

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	7 Tahun 2024	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang	2024-09-02	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	13 Tahun 2011	Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	2011-11-17	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
3	7 Tahun 2014	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	2014-05-26	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	2 Tahun 2014	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Sumedang	2014-01-03	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
5	17 Tahun 2014	Kawasan Tanpa Rokok	2014-12-23	Rp50.000.000,00		Berlaku

27. Kabupaten Tasikmalaya

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	7 Tahun 2017	Penyelenggaraan dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	2017-12-20	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	12 Tahun 2017	Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan	2017-12-29	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
3	7 Tahun 2015	Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Tasikmalaya	2015-12-30	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
4	3 Tahun 2014	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2014-09-04	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
5	9 Tahun 2013	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2013-12-30	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

28. Kota Tasikmalaya

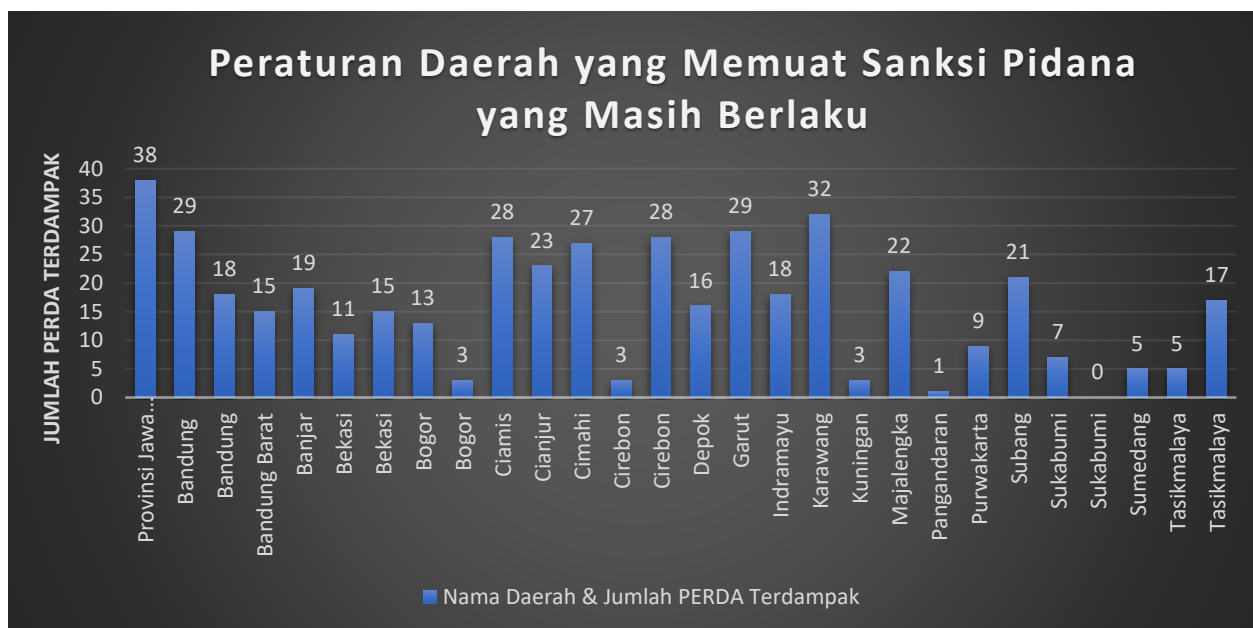
No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
1	7 Tahun 2025	Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	2025-10-31	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
2	6 Tahun 2022	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	2022-09-29	Rp5.000.000,00	1 tahun	Berlaku
				Rp15.000.000,00	2 Bulan	Berlaku
				Rp30.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
3	2 Tahun 2021	Pengelolaan Air Limbah Domestik	2021-09-13	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
4	11 Tahun 2018	Kawasan Tanpa Rokok	2018-12-27	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
5	6 Tahun 2017	Izin Mendirikan Bangunan	2017-09-06	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
6	2 Tahun 2016	Penyelenggaraan Reklame	2016-07-19	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
7	15 Tahun 2015	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya	2015-12-30	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
8	7 Tahun 2015	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Tasikmalaya	2015-08-24	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
			2015-08-24	Rp50.000.000,00	6 Bulan	Berlaku
9	8 Tahun 2014	Penyelenggaraan Kepariwisataaan	2014-10-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp10.000.000.000,00	7 tahun	Berlaku
				Rp5.000.000.000,00	1 tahun	Berlaku
10	6 Tahun 2014	Hutan Kota	2014-10-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
11	1 Tahun 2014	Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	2014-02-03	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
12	10 Tahun 2013	Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi	2013-10-22	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
13	5 Tahun 2013	Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Nomor Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya	2013-10-01	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
14	7 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya	2012-10-02	Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
15	8 Tahun 2010	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2010-12-30	2 (dua) kali jumlah pajak terutang	1 tahun	Berlaku

No	Nomor	Judul	Tanggal Diundangkan	Sanksi		Status
				Pidana Denda	Pidana Kurungan	
				4 (empat) kali jumlah pajak terutang	2 Tahun	Berlaku
				Rp4.000.000,00	1 tahun	Berlaku
				Rp10.000.000,00	2 Tahun	Berlaku
16	5 Tahun 2008	Perubahan Atas 12 (Dua Belas) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya yang Mengatur Ketentuan Pidana Kurungan Lebih dari 3 Bulan	2008-05-05	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp1.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp25.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp3.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp25.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp25.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
				Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku
Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku				
Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku				
Rp25.000.000,00	3 Bulan	Berlaku				
Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku				
Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku				
Rp50.000.000,00	3 Bulan	Berlaku				
17	17 Tahun 2004	Irigasi	2004-08-27	Rp5.000.000,00	3 Bulan	Berlaku

Berdasarkan data yang terkumpul pada tanggal 9 Januari 2026 kemudian diolah dengan memilah Peraturan Daerah yang memuat Sanksi Pidana yang masih berlaku ditemukan data sebagai berikut:

	Nama Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang terdampak	Keterangan
1.	Provinsi Jawa Barat	38	Provinsi
2.	Bandung	29	Kabupaten
3.	Bandung	18	Kota
4.	Bandung Barat	15	Kabupaten
5.	Banjar	19	Kota
6.	Bekasi	11	Kabupaten
7.	Bekasi	15	Kota
8.	Bogor	13	Kabupaten
9.	Bogor	3	Kota
10.	Ciamis	28	Kabupaten
11.	Cianjur	23	Kabupaten
12.	Cimahi	27	Kota
13.	Cirebon	3	Kabupaten
14.	Cirebon	28	Kota
15.	Depok	16	Kota
16.	Garut	29	Kabupaten
17.	Indramayu	18	Kabupaten
18.	Karawang	32	Kabupaten
19.	Kuningan	3	Kabupaten
20.	Majalengka	22	Kabupaten
21.	Pangandaran	1	Kabupaten
22.	Purwakarta	9	Kabupaten
23.	Subang	21	Kabupaten
24.	Sukabumi	7	Kabupaten
25.	Sukabumi	Belum mengisi	Kota
26.	Sumedang	5	Kabupaten
27.	Tasikmalaya	5	Kabupaten
28.	Tasikmalaya	17	Kota



B. Peraturan Daerah di Kabupaten Karawang yang terdampak dan Alternatif Penyelesaiannya

Berdasarkan data yang telah dihimpun dan diinventarisir oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang terdapat 32 (tiga Puluh dua) Peraturan Daerah yang terdampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang perlu segera dilakukan penyesuaian agar selaras dan tercapai kepastian hukum khususnya dalam pengenaan sanksi pidana kepada masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana maka Pemerintah Pusat telah menyesuaikan Tindak Pidana bagi Undang-Undang di luar UU KUHP. Meskipun di dalam Ketentuan Bab II Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam Pasal IV telah mengatur terkait Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah, akan tetapi perlu segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun dan membuat Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Pidana Dalam Peraturan Daerah. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 baru menyampaikan cara penyesuaian pidananya saja akan tetapi belum serta merta melakukan penyesuaian pidana dalam Peraturan Daerah, sebagaimana dicontohkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 terkait Daftar Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Di Luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah harus dimuat dalam Peraturan Daerah atau Peraturan yang Lebih tinggi sesuai dengan asas *lex Superior Derogat Legi Inferiori* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip hierarki dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah memiliki hierarki tersendiri. Perubahan suatu peraturan harus dilakukan oleh lembaga yang sama atau lebih tinggi dan menggunakan jenis peraturan yang setingkat.
2. Daya ikat, karena Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama dengan Kepala Daerah, maka perubahan materi muatannya wajib melalui mekanisme persetujuan bersama (DPRD dan Gubernur/Bupati/Walikota) yang diwadahi kembali dalam produk hukum Peraturan Daerah.
3. Kepastian Hukum
Kepastian hukum dalam penyesuaian pidana menitikberatkan pada aturan yang jelas, terprediksi dan tidak berubah-ubah secara sewenang-wenang. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperbaharui sistem hukum dalam peraturan daerah agar lebih relevan.

Oleh karena itu langkah-langkah yang perlu segera dilakukan oleh Bagian Hukum adalah:

1. Menginventarisir dan membuat draft Penyesuaian Peraturan Daerah yang terdampak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
2. Mengajukan usulan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah dengan menambahkan 1 (satu) usulan yaitu Raperda tentang Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
3. Menyusun Penjelasan/Keterangan terkait urgensi Penyusunan Raperda Penyesuaian Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang.
4. Menyusun Draft Raperda Penyesuaian Sanksi Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang sebagai bahan Lampiran Usulan Propemperda.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pemerintah Daerah perlu segera menindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut :

1. Menginventarisir Peraturan Daerah yang masih berlaku sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang memiliki sanksi pidana untuk segera disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
2. Segera mengusulkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah
3. Membuat Kajian Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian Pidana.
4. Membuat draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyesuaian Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota masing-masing.

B. Saran

Untuk menghindari ketidakpastian di Daerah terkait pemberlakuan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Akan tetapi perlu diimbangi dengan tahapan ataupun prosedur agar Daerah Kabupaten/Kota tidak kebingungan dalam menafsirkan penyesuaian pidana tersebut. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri sebaiknya mengambil langkah baik melalui Surat Edaran ataupun dalam bentuk lain kepada Pemerintah Daerah untuk segera melakukan penyesuaian sanksi tindak pidana dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Amanta.
- Herbert, L. P. (1968). *The Limits of Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Muladi. (n.d.). *Kapita Selekta Sistem Pidana*. BP-UNDIP.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.